

Pendidikan Demokrasi bagi Pelajar dan Mahasiswa di Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Literasi Politik

Robi Cahyadi Kurniawan¹, Himawan Indrajat^{2*}, Budi Kurniawan³, Aman Toto Dwijono⁴
^{1,2,3,4} Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Jalan Sumantri Brodjonegoro, No. 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145

*Korespondensi: himawan.indrajat@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pendidikan demokrasi kepada para pelajar dan SMA di Kota Bandar Lampung, karena mereka diharapkan menjadi agen perubahan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena mereka memiliki tingkat literasi politik yang tinggi. Selain diharapkan pendidikan ini maka para pelajar dan mahasiswa ini tidak sekedar paham haknya sebagai warga negara untuk memilih ketika pemilu tetapi juga mengerti maksud dan tujuan pemilu, memahami tentang demokrasi, partisipasi politik dan kebijakan publik. Sehingga yang diharapkan pemilih pemula akan menjadi pemilih yang cerdas dan melek politik.

Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penajagan pengetahuan dan pemahaman peserta seminar dengan menggunakan evaluasi awal melalui pre test. Cara ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta pendidikan demokrasi tentang pemilu, partisipasi politik, kebijakan publik dan pemilih cerdas. Memberikan materi seminar berupa makalah dan simulasi yang berkaitan dengan pilkada, partisipasi politik, dan kebijakan publik. Evaluasi akhir melalui post test dan diskusi atas masalah-masalah yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilu, Partisipasi Politik Pelajar dan Mahasiswa

1. ANALISIS SITUASI

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Henry B Mayo demokrasi adalah kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat (Budiardjo, 2003).

Pada penyelenggaraan pemilu terdapat suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh, yaitu pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula

Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 - 21 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah.

Para pemilih pemula biasanya adalah para pelajar SMA dan Mahasiswa, sehingga pendidikan demokrasi diperlukan dalam membentuk generasi muda yang diharapkan memiliki tingkat literasi politik yang tinggi sehingga mereka tidak mudah untuk diarahkan untuk kepentingan politik tertentu. Data jumlah pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung belum terdata, tetapi data jumlah pemilih pemula pada Pileg dan Pilpres 2019 dapat dijadikan patokan dalam pemberian pendidikan demokrasi. Karena jumlah pemilih pemula pasti bertambah jumlah, berikut ini di kota Bandar Lampung pada pemilu 2019 berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung :

Tabel 1. Jumlah Pemilih Pemula Pemilu 2019 di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bumi Waras	440	401	841
2	Enggal	179	166	345
3	Kedamaian	393	366	759
4	Kedaton	311	292	603
5	Kemiling	624	574	1.198
6	Labuan Ratu	325	294	619
7	Langkapura	268	214	482
8	Panjang	521	511	1.032
9	Rajabasa	420	409	829
10	Sukabumi	550	531	1.081
11	Sukarame	438	386	824
12	Tanjung Senang	431	411	842
13	Tj. Karang Barat	414	405	819
14	Tj. Karang Pusat	368	331	699
15	Tj. Karang Timur	241	260	501
16	Teluk Betung Barat	280	239	519
17	Teluk Betung Selatan	295	258	553
18	Teluk Betung Timur	411	363	774
19	Teluk Betung Utara	379	375	754
20	Way Halim	442	414	856
Jumlah		7.730	7.200	14.930

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1 jumlah pemilih pemula pemilu 2019 di kota Bandar Lampung di atas kita dapat mengetahui bahwa jumlah pemilih pemula di kota Bandar Lampung sebanyak 14.930 pemilih pemula. Jumlah tersebut tentunya cukup berpengaruh dan cukup penting bagi perkembangan demokrasi kita, apabila mayoritas pemilih pemula para pelajar SMA dan Mahasiswa ini cenderung apatis dan mudah dimobilisasi ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi kita.

Berdasarkan latar belakang analisa situasi dan rumusan maka disusunlah tujuan kegiatan pendidikan pemilih sebagai berikut (1) diperlukannya pendidikan pemilih bagi masyarakat terutama para pelajar dan mahasiswa agar mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas dan melek politik. Sehingga mereka tidak menjadi sasaran mobilisasi dari para politisi dan tidak bisa dibeli suaranya dengan politik uang. (2) menciptakan kader demokrasi untuk menyebarkan pentingnya menjadi pemilih cerdas pada masyarakat. Karena pemilih pemula adalah generasi muda harapan bangsa apabila mereka menjadi individu yang cerdas maka diharapkan dapat membawa perubahan demokrasi yang lebih baik.

2. METODE PELAKSANAAN

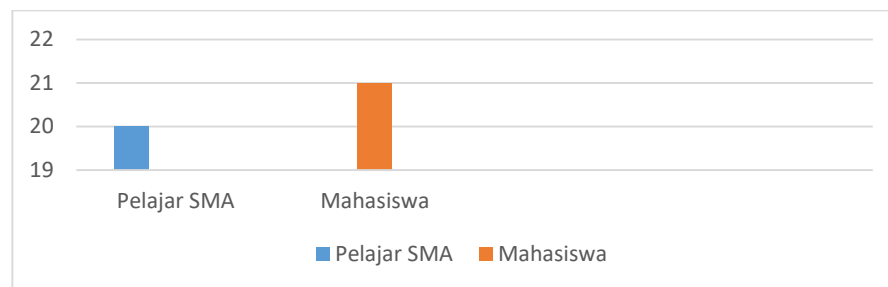
Pelaksanaan program ini disusun secara sistematis pada alur kerja dengan pendekatan: 1) partisipatif, 2) pembelajaran (teori dan praktik), serta 3) pendampingan. Pendekatan partisipatif dilakukan secara koordinatif, melibatkan tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) dengan mitra (pelajar dan mahasiswa). Pendekatan teori dan praktek dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, tatap muka dan penugasan baik teori maupun praktik. Kegiatan pendampingan, dilakukan dengan evaluasi kegiatan selanjutnya dilakukan refleksi dan keberlanjutan dalam bentuk monitoring dan pendampingan, baik terprogram maupun insidental guna menjaga kualitas hasil kegiatan serta meningkatkan kemitraan.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengabdian maka dilakukan metode observasi/ studi awal dilakukan dengan melakukan survei pre test dan post test untuk pengumpulan data-data permasalahan pada wilayah kerja mitra. Sasaran adalah para pemilih pemula. Tujuan metode ini adalah untuk mengumpulkan data awal berupa fakta di lapangan untuk mendapat pemecahannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

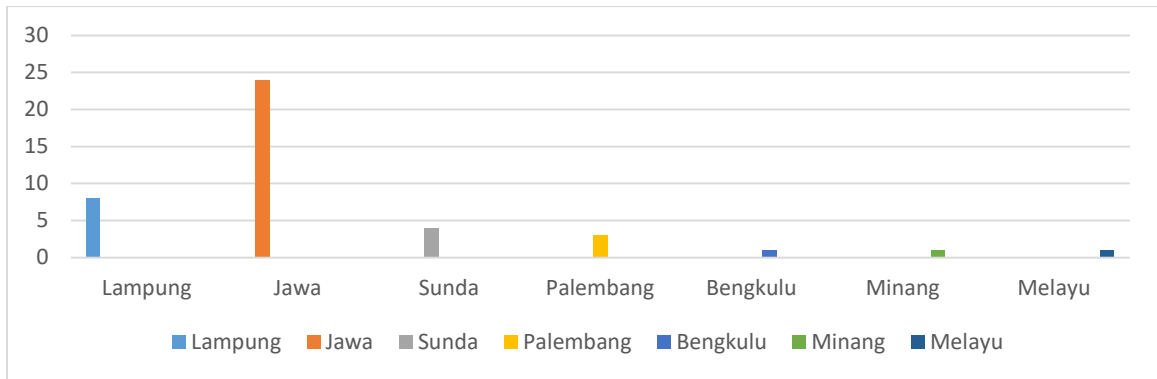
Peserta pendidikan demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 adalah para pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa di Kota Bandar Lampung yang merupakan pemilih pemula, jumlah peserta yang mengikuti pendidikan demokrasi berjumlah 41 orang yang terdiri dari 21 mahasiswa dan 20 pelajar SMA. Acara pengabdian pendidikan demokrasi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media zoom. Berikut ini grafik peserta pendidikan demokrasi.



Grafik 1. Peserta Pendidikan demokrasi berdasarkan status

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Kemudian berdasarkan asal suku peserta terdiri dari 24 orang bersuku Jawa, 8 orang bersuku Lampung, 3 orang bersuku Sunda, 1 orang bersuku Bengkulu, 1 orang bersuku Melayu Kalimantan, 3 orang bersuku Palembang, 1 orang bersuku Minang. Berikut ini jumlah grafik peserta berdasarkan jenis kelamin. Dari beragamnya asal suku peserta menunjukkan betapa multikulturalnya penduduk provinsi Lampung serta menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan demokrasi ditingkat lokal.



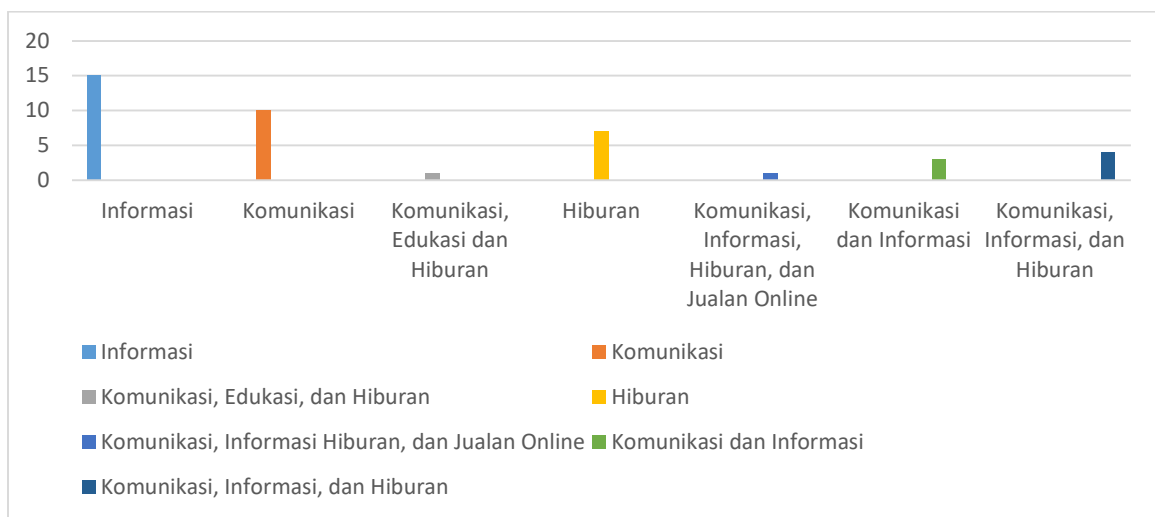
Grafik 2. Peserta Pendidikan demokrasi berdasarkan suku bangsa

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Dari beragamnya asal suku peserta menunjukkan betapa multikulturalnya penduduk provinsi Lampung serta menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan demokrasi ditingkat lokal karena rawan politisasi politik identitas pemilih untuk kepentingan suara pada Pemilihan Umum baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislative dan pemilihan presiden. Oleh karena itu diperlukan pendidikan demokrasi untuk memberikan pemahaman berdemokrasi dan bernegara pada pemilih pemula bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya agar para pemilih pemula sadar ketika mereka menggunakan hak pilih dan memilih didasarkan kecakapan calon bukan berdasarkan kesamaan identitas kesukuan atau agama.

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu).

Dalam masa sekarang ini masyarakat dapat mengakses berita atau informasi mengenai perpolitikan nasional melalui internet bisa dari situs berita atau bisa juga melalui media social, maraknya penggunaan internet untuk mendapatkan informasi perpolitikan nasional bisa dimanfaatkan untuk penyebaran nilai-nilai demokrasi. Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa biasa mendapatkan informasi dari media social karena seringnya mereka menggunakan internet. Dari 41 peserta pendidikan demokrasi semuanya memiliki akun media social



Grafik 3. Tujuan menggunakan media sosial

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

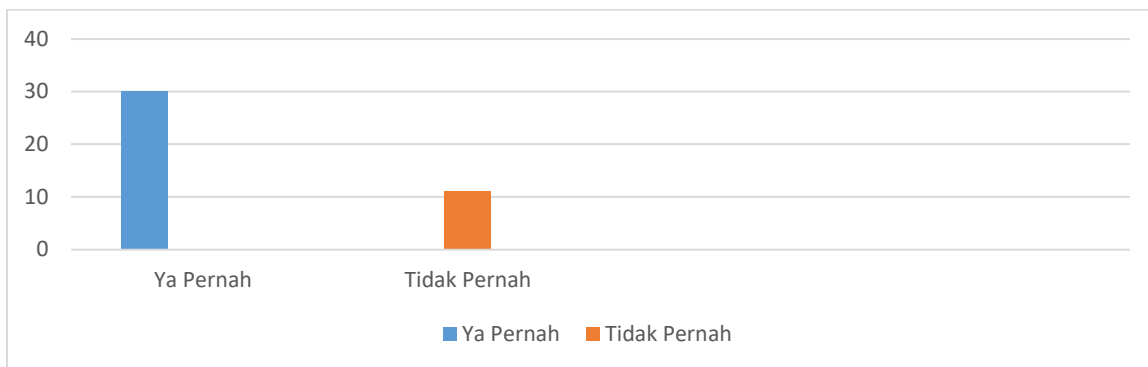
Walaupun tujuan pengguna akun media sosial berbeda tetapi semua peserta pernah mendapatkan informasi tentang politik Indonesia dari akun media sosial mereka, berikut ini grafik jumlah peserta yang pernah mendapatkan informasi tentang politik Indonesia.



Grafik 4. Pengalaman mendapatkan berita politik dari media sosial

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Ketika kita bicara tentang politik nasional kita juga memperbincangkan penggunaan politik identitas untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat melalui sentimen kesamaan-kesamaan identitas dan sentimen identitas yang berbeda melalui ujaran-ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Berikut ini data grafik informasi tentang ujaran kebencian yang pernah peserta pelatihan dapatkan dari media sosial, tetapi ada beberapa peserta yang tidak pernah mendapatkan informasi tentang ujaran kebencian.



Grafik 5. Pengalaman mendapatkan informasi tentang ujaran kebencian

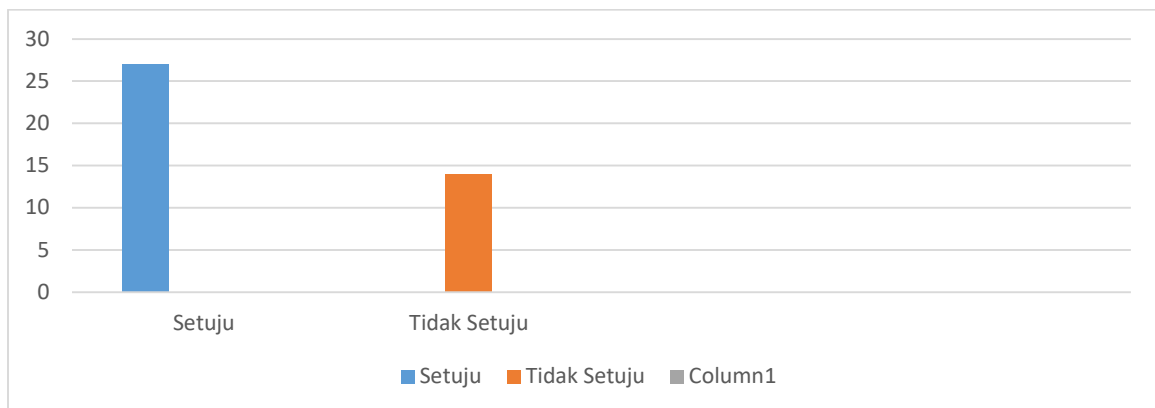
Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Di media sosial juga menjadi sarana untuk mengkritik pemerintah, dalam kuesioner pre test yang kami berikan semua peserta pernah mendapatkan informasi kritikan terhadap kebijakan pemerintah semua peserta pernah mendapatkan informasi tersebut, dan tidak semua peserta setuju bahwa media sosial digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Berikut ini grafik tentang informasi kritikan terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan media sosial untuk mengkritik kebijakan pemerintah.



Grafik 6. Pengalaman mendapatkan informasi kritikan terhadap pemerintah

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

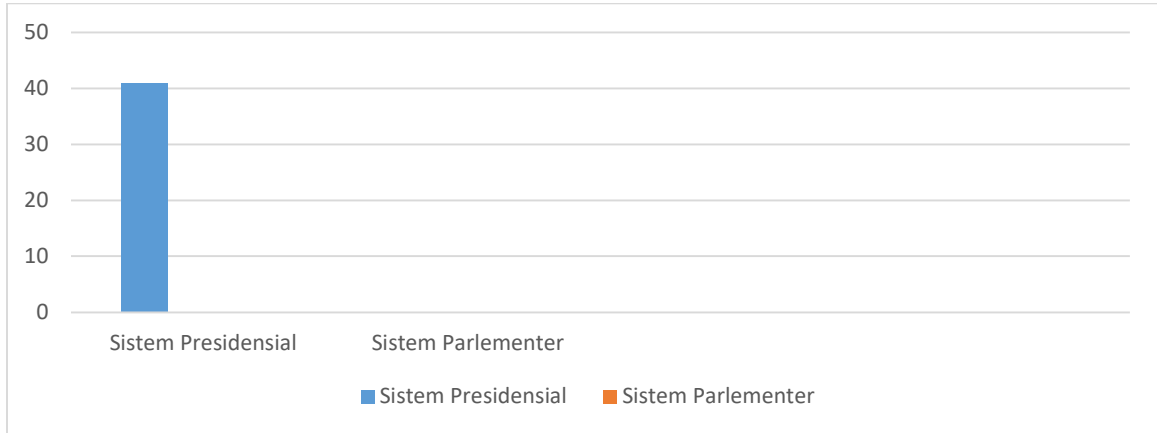


Grafik 7. Pengalaman menggunakan media sosial untuk mengkritik pemerintah

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

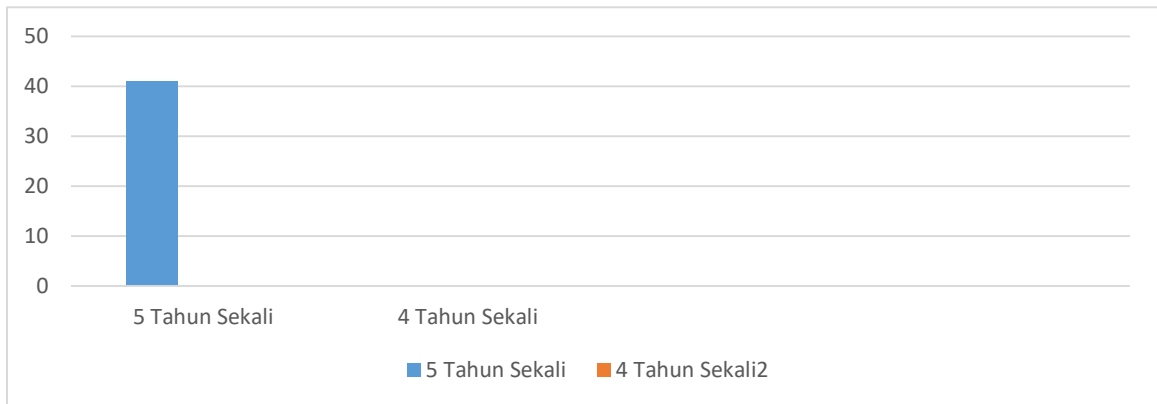
Pada tingkat literasi politik atau melek politik pada pengetahuan soal system pemerintahan Indonesia semua peserta pada saat pre test mengetahui bahwa

Indonesia menganut system pemerintahan presidensial bukan menggunakan system pemerintahan parlementer, dan berapa tahun sekali pelaksanaan pemilihan umum semua peserta mengetahui bahwa pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali. Berikut ini grafik soal pengetahuan sistem pemerintahan Indonesia dan periode pelaksanaan pemilihan umum.



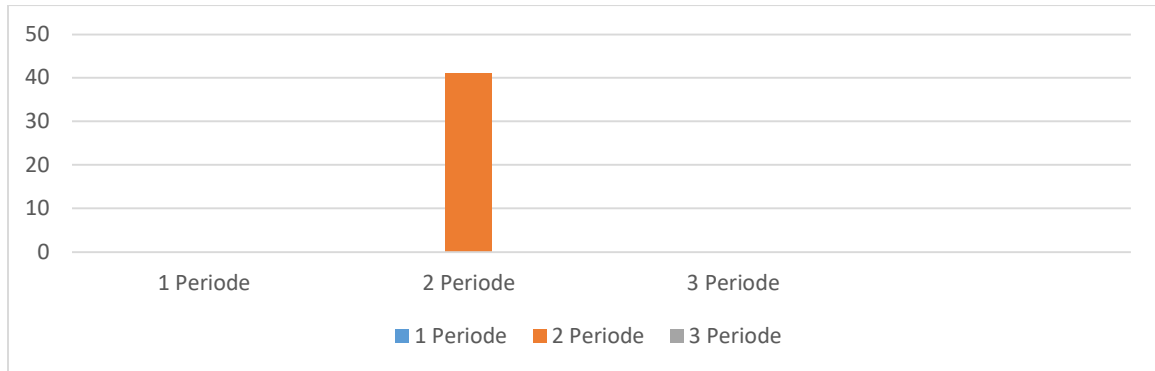
Grafik 8. Pengetahuan tentang sistem pemerintahan Indonesia

Sumber : Hasil pengabdian, 2021



Grafik 9. Pengetahuan tentang periode pelaksanaan pemilu

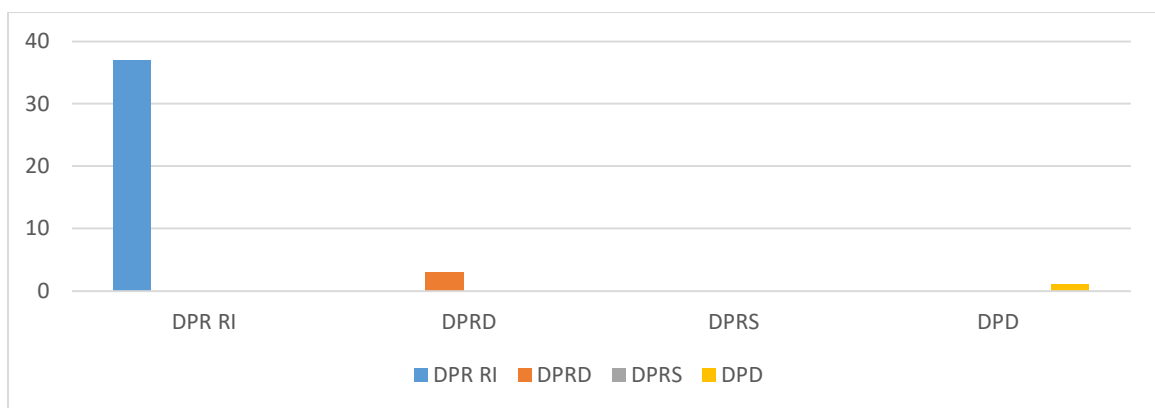
Sumber : Hasil pengabdian, 2021



Grafik 10. Pengetahuan tentang periode masa jabatan presiden

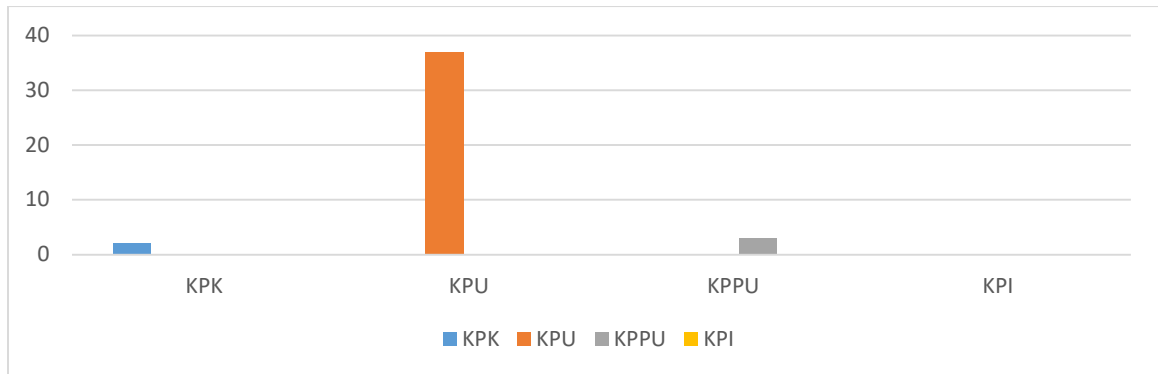
Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Kemudian pada pre test pengetahuan soal periode jabatan presiden maksimal dijabat berapa periode ternyata tidak semua mengetahui bahwa periode jabatan presiden maksimal dijabat dua periode. Begitu juga pengetahuan soal lembaga tinggi negara yang bertugas membuat rancangan undang-undang, dan menyusun APBN dan mengawasi pelaksanaan APBN tidak semua peserta mengetahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas tersebut. Pada pengetahuan tentang lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak semua peserta tahu bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Grafik 10 hasil pre test pengetahuan mengenai periode jabatan presiden, pengetahuan tentang lembaga tinggi negara penyusun RUU, penyusun APBN dan pengetahuan tentang lembaga penyelenggara pemilu.



Grafik 11. Pengetahuan tentang lembaga tinggi negara penyusun Undang-undang

Sumber : Hasil pengabdian, 2021



Grafik 12. Pengetahuan tentang lembaga penyelenggara pemilu

Sumber : Hasil pengabdian, 2021

Berdasarkan hasil pre test masih ada beberapa peserta pendidikan demokrasi yang belum mengetahui tentang tugas dan fungsi DPR RI selaku lembaga penyusun RUU, Penyusun APBN dan yang mengesahkan APBN. Dan juga masih ada beberapa peserta yang belum tahu tentang KPU sebagai lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilihan umum. Untuk pengetahuan tentang system pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial dan periode pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali, serta periode maksimal jabatan presiden yaitu dua periode semua peserta mengetahuinya. Dalam sistem demokrasi, kompetisi antar pemimpin dilakukan secara teratur (Gaffar, 2006), sehingga dapat menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

Sehingga materi yang kami berikan setelah pre test berupa penguatan dan memudahkan kami untuk memberikan materi tentang pendidikan demokrasi karena mereka sudah memiliki dasar pengetahuan tentang demokrasi, dan semua peserta adalah pengguna media sosial sehingga informasi tentang politik nasional dapat mudah mereka dapatkan.

4. PENUTUP

Hasil pengabdian kepada masyarakat kami terhadap pelajar dan mahasiswa di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan tentang demokrasi yang memadai sehingga memudahkan kami dalam memberikan materi penguatan dan penambahan pengetahuan tentang demokrasi. Apalagi mereka semua adalah pengguna media sosial dengan media sosial

memudahkan mereka untuk mendapatkan pengetahuan tentang demokrasi di Indonesia. Dengan pengetahuan demokrasi yang memadai tentu sangat menggembirakan karena mereka sebagai generasi muda harapan bangsa dapat membantu tugas akademisi, partai politik dan lembaga penyelenggaraan pemilu untuk memberikan pemahaman tentang demokrasi kepada rekan-rekan sebayanya.

Kegiatan pendidikan demokrasi harus diadakan secara berkelanjutan sehingga dapat semakin menguatkan pemahamannya tentang demokrasi di Indonesia, mereka juga dapat menjadi kader dalam penyebaran nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Dengan potensi yang besar ini tentu dapat membantu tugas dan fungsi KPU sehingga seharusnya KPU atau lembaga yang lain perlu bekerjasama dengan para pemilih muda untuk membantu tugas KPU dalam menyebarkan pemahaman tentang demokrasi. Partisipasi politik ini merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Budiardjo, 2003).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (ed). (2003). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, A. (1998). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.